

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Transformasi digital di sektor pemerintahan Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berdasarkan laporan *E-Government Development Index* (EGDI) tahun 2024, Indonesia memperoleh skor 0,7991 dan menempati peringkat ke-64 dari 193 negara, naik 13 peringkat dari survei sebelumnya [1]. Pencapaian ini mencerminkan peningkatan kualitas birokrasi menuju tata kelola yang lebih efisien dan berbasis data. Namun, penelitian Nurhidayat et al. (2024) mencatat bahwa tantangan digitalisasi masih mencakup keterbatasan integrasi sistem antar-unit, interoperabilitas data yang belum optimal, serta proses administrasi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi [2]. Kondisi tersebut juga terjadi di Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah mengimplementasikan aplikasi internal berbasis web bernama DIGITall sebagai platform administrasi dan manajemen keuangan. Meskipun sistem ini sudah digunakan secara luas dan menjadi pusat berbagai layanan internal, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah kebutuhan baru yang belum terpenuhi secara optimal. Dalam hal penyebaran informasi, misalnya, DIGITall belum dilengkapi dengan sistem notifikasi otomatis yang mampu mengirimkan pengumuman atau pemberitahuan kegiatan secara *real-time* kepada setiap pegawai. Akibatnya, informasi penting seperti jadwal rapat, pengumuman resmi, maupun agenda kegiatan masih sering disampaikan secara manual melalui pesan pribadi atau perantara antarpegawai, yang berpotensi menimbulkan keterlambatan informasi dan ketidaksinkronan antarunit. Pada sisi lain, proses pengelolaan lembur masih terpusat melalui portal utama DPR RI, sehingga unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal menghadapi keterbatasan akses untuk memantau status pengajuan dan persetujuan lembur. Kondisi ini menyebabkan proses validasi sering memerlukan waktu lebih lama dan kurang efisien. Sementara itu, pada aspek pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK), seluruh prosesnya saat ini masih dilakukan secara manual, mulai dari pengisian hingga pengecekan eviden. Hal ini menimbulkan risiko adanya tahapan verifikasi yang terlewat dan menyulitkan ketika harus menelusuri kembali data dari periode sebelumnya. Oleh karena itu, proses digitalisasi PIPK menjadi kebutuhan mendesak agar penyimpanan dan validasi data dapat dilakukan secara lebih sistematis, cepat, dan mudah ditelusuri. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem DIGITall perlu diperluas dengan modul-modul baru yang mampu menjawab kebutuhan spesifik tiap proses kerja agar efisiensi dan keterpaduan tata kelola administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dapat tercapai sepenuhnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan pengembangan lanjutan terhadap aplikasi DIGITall melalui penambahan tiga modul baru, yaitu modul lembur, modul berita, dan modul pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK). Pengembangan ini tidak dimaksudkan untuk mengganti sistem yang telah ada, melainkan memperluas fungsionalitas DIGITall agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan operasional yang semakin kompleks di lingkungan Sekretariat Jenderal. Ketiga modul tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi, mempercepat arus informasi antarunit kerja, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Secara konseptual, inisiatif ini juga

sejalan dengan arah kebijakan nasional mengenai transformasi digital pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu untuk mendukung keterpaduan data dan sistem antar-instansi serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi. [3].

Ketiga modul baru yang dikembangkan memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung kegiatan administrasi internal. Modul berita dirancang untuk mengatasi keterbatasan penyebaran informasi dengan menyediakan sistem publikasi dan notifikasi otomatis berbasis kewenangan, sehingga setiap pegawai dapat menerima pengumuman sesuai unit kerjanya langsung melalui dashboard utama secara *real-time*. Modul lembur dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas bagi bagian Sekretariat Jenderal dalam mengelola proses pengajuan, verifikasi, dan rekapitulasi lembur tanpa harus bergantung sepenuhnya pada portal utama DPR RI. Dengan adanya modul ini, proses validasi dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, modul PIPK berfokus pada digitalisasi proses pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Melalui modul ini, seluruh tahap pengisian, validasi, dan penyimpanan eviden dapat dilakukan secara terpusat dan terdokumentasi dengan rapi, sehingga meminimalkan risiko kesalahan verifikasi serta memudahkan penelusuran data pada periode sebelumnya.

Dari sisi teknis, pengembangan ketiga modul tersebut dilakukan dengan memanfaatkan arsitektur *full-stack Laravel framework* yang memungkinkan integrasi antara lapisan *frontend* dan *backend* secara menyeluruh. Lingkungan pengembangan menggunakan XAMPP dengan Apache Web Server dan basis data MySQL yang dijalankan di dalam *Docker container* untuk memastikan konsistensi konfigurasi serta kemudahan dalam proses *deployment*. Metode pengembangan yang diterapkan mengacu pada pendekatan *Software Development Life Cycle* (SDLC) secara umum. Tahapan pengembangan meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, serta implementasi fitur sesuai dengan ruang lingkup pengembangan modul yang dikerjakan selama kegiatan magang.

## 1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Kerja magang ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Maksud dari pelaksanaan kerja magang di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut.

1. Berkontribusi dalam pengembangan modul Berita, Lembur, dan PIPK sebagai bagian dari sistem web DIGITall.
2. Mengetahui proses kerja tim pengembang dalam lingkungan birokrasi pemerintahan yang menerapkan prinsip kolaboratif dalam membangun aplikasi DIGITall.

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan magang ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan mengimplementasikan Modul Berita yang mampu mengirim notifikasi otomatis kepada pengguna pada rentang waktu H-3 hingga tenggat unggah sesuai ketentuan internal.
2. Merancang dan mengimplementasikan Modul Lembur untuk memproses serta melacak persetujuan lembur pegawai berdasarkan struktur tanggung jawab per Kepala Bagian.

3. Merancang dan mengimplementasikan Modul PIPK yang difokuskan pada pengelolaan data Tabel A, dengan menyusun alur pengajuan dan mendukung proses verifikasi hingga tahap *e-sign* akhir yang dilakukan oleh tim terkait.

### 1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang ini dilaksanakan selama enam bulan, dimulai pada tanggal 1 Agustus 2025 hingga 31 Januari 2026. Kegiatan magang dilaksanakan setiap hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat, dengan jam kerja pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Waktu istirahat ditetapkan pada pukul 12.00 hingga 13.00 WIB. Presensi dilakukan secara tatap muka bersama *supervisor* di unit kerja terkait untuk memastikan kehadiran dan kedisiplinan peserta magang. Selama pelaksanaan magang, peserta diwajibkan berpakaian rapi dengan menggunakan kemeja dan celana bahan, tidak diperkenankan mengenakan celana jeans, serta mengenakan batik setiap hari Jumat sesuai ketentuan berpakaian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Prosedur pelaksanaan kerja magang meliputi beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan magang dilakukan secara *onsite* di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan sistem presensi tatap muka.
2. Mengikuti pengarahan dan pembekalan yang diberikan oleh *supervisor* terkait tugas dan tanggung jawab selama masa magang.
3. Melaksanakan kegiatan harian sesuai jadwal kerja yang telah ditentukan dan mematuhi ketentuan kedisiplinan serta etika kerja yang berlaku.
4. Melakukan koordinasi dengan pembimbing lapangan dan anggota tim pengembang dalam setiap aktivitas kerja, termasuk pelaporan perkembangan kegiatan.
5. Mengikuti rapat mingguan bersama tim programmer yang dilaksanakan setiap hari Jumat untuk membahas progres, kendala, serta evaluasi pekerjaan.
6. Mengikuti evaluasi dan diskusi berkala dengan *supervisor* sebagai bagian dari proses pembelajaran.